

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Dukung Program Prioritas DKI Jakarta, DPRD Setujui Alokasi Pangan Murah Bersubsidi Rp 985 Miliar

**WARTA KOTA, JAKARTA** - Kasus stunting pada anak atau gangguan pertumbuhan karena kurangnya asupan gizi seimbang menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dengan adanya program pangan murah bersubsidi, diharapkan mampu menekan dan mengatasi masalah stunting yang terjadi.

Dalam pembahasan Raperda APBD tahun 2024, Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui alokasi anggaran program pangan murah bersubsidi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) sebesar Rp 985 miliar.

Besaran itu diperuntukkan untuk 924.332 penerima manfaat.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina tak menampik bila program pangan murah bersubsidi beberapa waktu lalu mengalami kendala.

Seperti terjadinya antrean yang panjang, hingga kosongnya stok paket pangan di lapangan.

Karena itu, dia meminta Dinas KPKP sebagai SKPD dan BUMD bidang pangan mampu menjamin ketersediaan stok, sehingga distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Tidak boleh lagi ada penumpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah.

"Saya sependapat betul kalo (anggaran-nya) bisa ditambah juga, tapi titik distribusinya supaya ditambah juga," ujarnya pada rapat pembahasan APBD di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

## Jaga stabilitas harga

Selain bertujuan meningkatkan gizi

masyarakat, subsidi pangan juga dilancarkan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi barometer kontrol harga pangan di pasaran.

Dalam setiap paket pangan murah bersubsidi masyarakat bisa mendapatkan komoditas beras kualitas premium per lima kilogram dibanderol Rp 30.000.

Kemudian, daging sapi Rp 35.000 per kilogram, daging ayam Rp 8.000 per kilogram, ikan kembung Rp 13.000 per kilogram, telur ayam Rp 10.000 per tray dan susu UHT Rp 30 ribu per karton isi 24 pack.

Masyarakat dapat menebus seluruh komoditas tersebut seharga Rp 126.000.

## Enam kegiatan prioritas anggaran

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam pidatonya pada penyampaian usulan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 di paripurna DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu, menyampaikan enam program prioritas kegiatan anggaran.

Dua diantaranya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan penurunan stunting di Jakarta.

Heru Budi menyampaikan, bahwa anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk APBD 2024 sebesar Rp 81,58 triliun, mengalami kenaikan sebesar 2,58 persen dari Rancangan Perubahan APBD 2023 sebesar Rp 79,53 triliun.

"Saya berharap penjelasan ini dapat membantu pembahasan pada rapat komisi," kata Heru.

Distribusi pangan murah bersubsidi tepat

sasaran

Perumda Dharma Jaya sebelumnya telah memastikan bahwa distribusi subsidi pangan murah telah berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Mereka telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah kemungkinan penumpukan antrean.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menuturkan, langkah-langkah yang diambil perusahaan ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam distribusi pangan murah, tetapi juga memastikan bantuan ini tepat sasaran.

Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni pemberian nomor antrean kepada masyarakat penerima manfaat satu hari sebelum hari pendistribusian.

"Hal ini bertujuan meminimalkan waktu yang dihabiskan masyarakat dalam antrean saat pengambilan subsidi pangan murah," jelas Raditya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Dharma Jaya juga membatasi jumlah masyarakat penerima manfaat hingga 300 orang per hari.

Dengan demikian, hal ini dapat mengantisipasi terjadinya antrean saat pengambilan subsidi pangan murah dengan sistem pengambilan nomor antrean sehari sebelumnya.

"Artinya, saat pengambilan daging sudah tidak mengantre. Masyarakat sudah bergiliran datang sesuai nomor antrean," ungkap Raditya.

Untuk pembatasan jumlah penerima bukan karena stok barang yang tidak mencukupi melainkan lebih pada menjaga ketertiban. (\* /dip)